

**ANALISIS PRINSIP – PRINSIP *GOOD CORPORAE GOVERNANCE*  
(STUDI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)**

**TESIS**

**OLEH**

**ANTONIUS KABAN  
151801047**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**ANALISIS PRINSIP – PRINSIP *GOOD CORPORAE GOVERNANCE*  
(STUDI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi  
Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program  
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ANTONIUS KABAN  
151801047**

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Analisis Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance  
(Studi Pada Perusahaan Pembiayaan)**

**N a m a : Antonius Kaban**

**N P M : 151801047**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**

**Pembimbing II**



**Drs. Usman Tarigan, MS**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**



**Dr. Warjio, MA**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 8 Mei 2017**

**N a m a : Antonius Kaban**

**N P M : 151801047**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**  
**Sekretaris : Ir. Azwana, MP**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**  
**Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS**  
**Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2017



(Antonius Kaban)

## A B S T R A K

### ANALISIS PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)

**N a m a** : Antonius Kaban  
**N I M** : 151801047  
**Program** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA  
**Pembimbing II** : Drs. Usman Tarigan, MS

Prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* merupakan hal yang penting sehingga kinerja semakin meningkat dan bermanfaat kepada para pemangku kepentingan. Rumusan masalah bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, hambatan, serta tindakan perbaikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. XYZ Finance Wilayah Sumut.

Penelitian kombinasi (*Mixed Methods Research*). Responden hanya para pimpinan dengan level supervisor sampai general manager. Pengumpulan data kuesioner, pengamatan dan wawancara responden. Analisis dengan statistic deskriptif, uji *credibility* triangulasi teknik dan *transferability*.

PT. XYZ Finance wilayah Sumut menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan : Prinsip keterbukaan : 3,7 baik. Akuntabilitas : 4,1 baik. Pertanggungjawaban 3,1 kurang baik. Independensi : 2,6 kurang baik. Kewajaran : 3,2 kurang baik. Total nilai : 4.026 pada wilayah baik. Dua faktor yang memegang peranan faktor internal, sebagai pendorong keberhasilan dan faktor eksternal, yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*. Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance* secara efektif sangat tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan. Rencana perbaikan kinerja dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* agar dapat memberikan hasil seperti diharapkan harus memenuhi kriteria praktis, orientasi pada waktu, spesifik dan berkomitmen.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Komitmen

## ABSTRACT

### ***THE ANALYSIS PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDY IN FINANCE COMPANY)***

***Name*** : Antonius Kaban  
***NIM*** : 151801047  
***Program*** : Master of Public Administration  
***Supervisor I*** : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA  
***Supervisor II*** : Drs. Usman Tarigan, MS

*The principles of Good Corporate Governance are important so that performance is increasing and beneficial to the stakeholders. The formulation of the problem of how Good Corporate Governance principles, obstacles, and actions to improve the principles of Good Corporate Governance in PT. XYZ Finance Region of North Sumatra.*

*Combined research (Mixed Methods Research) Respondent only leaders with supervisor level until general manager Questionnaire data collection, observation and interview of respondent Descriptive statistic analysis, triangulation technique credibility test and transferability.*

*PT. XYZ Finance of North Sumatera region runs the principles of Good Corporate Governance with: The principle of openness: 3.7 good. Accountability: 4.1 good. Accountability 3.1 is not good. Independence: 2.6 less good. Fairness: 3.2 is not good. Total value: 4,026 on either area. Two factors that play the role of internal factors, as a driver of success and external factors, which affect the successful implementation of Good Corporate Governance. Beyond these two factors, the most strategic aspect of supporting the implementation of Good Corporate Governance effectively depends on the quality, skill, credibility, and integrity of the various parties that drive the company's organs. Performance improvement plan in order to realize the principles of Good Corporate Governance in order to deliver the results as expected must meet the criteria of practical, time oriented, specific and committed.*

*Keywords: Good Corporate Governance, Commitment*

## Riwayat Hidup

Antonius Kaban, lahir di Medan pada tanggal 23 Maret 1982, anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan Drs. Benar Kaban dengan Ibu Norma Br Sembiring. Bersaudara dengan Mekaria Br Kaban, AMKG, Veronika Br Kaban, SST, Ika Sri Dwi Br Kaban, S.Kep, Ns, Yopi Yanta Kaban, SH, MH. Menikah dengan dr. Rimayani Sidabutar, M.Kes. Berdomisili di Jalan Pertahanan Gang Jore Patumbak Kp Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20361.

Jenjang Pendidikan formal yang di ikuti adalah SD Negeri 101791 Patumbak, lulus dan berijazah pada tahun 1994. SMP Negeri I Patumbak, lulus dan berijazah pada tahun 1997, SMU Swasta St. Maria Medan lulus dan berijazah pada tahun 2000. Jenjang perguruan tinggi dilalui adalah Program Studi Administrasi Negara pada Universitas Riau, lulus dan berijazah pada tahun 2005, Program Magister Manajemen Pada Universitas Andalas, lulus dan berijazah pada tahun 2010.

Bekerja diperusahaan swasta dibidang jasa pembiayaan konsumen sampai dengan sekarang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**ANALISIS PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Pada Perusahaan Pembiayaan)**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu serta memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan sesuai dengan jangka waktu yang cukup serta dapat penulis pertanggungjawabkan dengan hasil nilai yang baik pada sidang meja hijau Tesis pada Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Mei 2017

**P e n u l i s**

**Antonius Kaban**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISIS PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Pada Perusahaan Pembiayaan)”**.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

- Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
- Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
- Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
- Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA dan Drs. Usman Tarigan, MS
- Ayah dan Ibunda serta Isteri, serta semua saudara/keluarga.
- Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2015 MAP Kelas A.
- Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	10
2.2 Good Corporate Governance (GCG) .....	11
2.3 Tujuan Good Corporate Governance .....	15
2.4 Prinsip - Prinsip Dasar Good Corporate Governance .....	16
2.5 Metode dan Ruang Lingkup Penerapan Good Corporate Governance .....	19
2.5.1 Metode Penerapan Good Corporate Governance .....	19
2.5.2 Ruang Lingkup Penerapan Good Corporate Governance .....	20
2.5.3 Pedoman Praktis Penerapan Good Corporate Governance .....	21
2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan CGC .....	23
2.7 Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG .....	25
2.8 Batasan Penelitian .....	27
2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	27
2.10 Research Gap .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi/Objek Penelitian .....	33
3.2 Jenis Penelitian .....	33
3.3 Responden Penelitian .....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	36

3.4.1	Jenis Data .....	36
3.4.2	Sumber Data .....	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	39
3.6.1	Definisi Operasional .....	40
3.6.2	Pengukuran Instrumen Penelitian .....	43
3.7	Teknik Analisis Data .....	46

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Visi Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan .....	50
4.2	Bidang Usaha dan Produk .....	51
4.3	Struktur Organisasi dan Tugas Wewenang .....	52
4.3.1	Struktur Organisasi .....	52
4.3.2	Tugas dan Wewenang .....	54
4.4	Pengumpulan Data .....	58
4.5	Deskriptif Demografi Responden .....	59
4.5.1	Jenis Kelamin .....	59
4.5.2	Umur .....	60
4.5.3	Pendidikan .....	60
4.5.4	Masa Kerja .....	61
4.5.5	Jabatan .....	61
4.5.6	Status Perkawinan .....	62
4.5.7	Tingkat Penghasilan .....	63
4.5.8	Status Karyawan .....	63
4.6	Hasil Penelitian .....	64
4.6.1	Uji Validitas .....	64
4.6.2	Pengujian Realiabilitas .....	64
4.7	Hasil Penelitian Kuantitatif .....	66
4.7.1	Hasil Kuesioner Atas Transparansi .....	67
4.7.2	Hasil Kuesioner Atas Akuntabilitas .....	69
4.7.3	Hasil Kuesioner Atas Pertanggungjawaban .....	72
4.7.4	Hasil Kuesioner Atas Independensi .....	74
4.7.5	Hasil Kuesioner Atas Kewajaran .....	76
4.8	Gambaran Prinsip-Prinsip GCG PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	79
4.8.1	Kategori Prinsip Keterbukaan (transparency) .....	79
4.8.2	Kategori Prinsip Akuntabilitas (accountability) .....	80
4.8.3	Kategori Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility) .....	80
4.8.4	Kategori Prinsip Independensi (independency) .....	81
4.8.5	Kategori Prinsip Kewajaran (fairness) .....	82

4.8.6	Prinsip-Prinsip GCG PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	83
4.9	Hasil Penelitian Kualitatif .....	85
4.9.1	Uji Triangulasi .....	85
4.9.2	Hasil Wawancara Prinsip Keterbukaan (Transparency) .....	87
4.9.3	Hasil Wawancara Prinsip akuntabilitas (Accountability) .....	94
4.9.4	Hasil Wawancara Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) .....	99
4.9.5	Hasil Wawancara Prinsip independensi (Independency) .....	107
4.9.6	Hasil Wawancara Prinsip kewajaran (Fairness) .....	112
4.9.7	Hasil Wawancara dengan Konsumen dan Supplier/Mitra Kerja .....	117
4.9.8	Summary Hasil Wawancara dengan Informan .....	117
4.10	Hasil Pengamatan Good Corporate Governance di PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	120
4.10.1	Pengamatan Prinsip Transparasi .....	120
4.10.2	Pengamatan Prinsip Akuntabilitas .....	122
4.10.3	Pengamatan Prinsip Responsibilitas .....	124
4.10.4	Pengamatan Prinsip Independensi .....	126
4.10.5	Pengamatan Prinsip Kewajaran .....	127
4.11	Model Hasil Penelitian .....	131
4.12	Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	133
4.13	Hambatan-Hambatan Dalam Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	138
4.13.1	Hambatan GCG dari Internal .....	138
4.13.1.1	Hambatan dari Manajemen .....	138
4.13.1.2	Hambatan dari Asset Quality (Kualitas Piutang) .....	139
4.13.1.3	Hambatan dari Technology .....	139
4.13.1.4	Hambatan dari Human Resources .....	140
4.13.1.5	Hambatan dari Budaya .....	140
4.13.2	Hambatan GCG dari Eksternal .....	141
4.13.2.1	Hambatan dari Hukum .....	141
4.13.2.2	Hambatan dari Lingkungan Bisnis/Pasar .....	142
4.13.2.3	Hambatan dari Permodalan .....	142
4.14	Tindakan Perbaikan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance di PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	143
4.14.1	Perbaikan Internal .....	143
4.14.1.1	Perbaikan dari Manajemen .....	143

4.14.1.2	Perbaikan dari Asset Quality (Kualitas Piutang) .....	146
4.14.1.3	Perbaikan dari Technology .....	149
4.14.1.4	Perbaikan dari Human Resources .....	151
4.14.1.5	Perbaikan dari Budaya .....	157
4.14.2	Perbaikan Eksternal .....	159
4.14.2.1	Perbaikan dari Hukum .....	159
4.14.2.2	Perbaikan dari Lingkungan Bisnis/Pasar .....	161
4.14.2.3	Perbaikan dari Permodalan .....	164

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	166
5.1	Kesimpulan Kuantitatif .....	166
5.2	Kesimpulan Kualitatif .....	166
5.2	Implikasi Penelitian .....	168
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	174
5.4	Saran .....	175
5.4.1	Saran Untuk Penelitian Kuantitatif .....	175
5.4.2	Saran Untuk Penelitian Kualitaitaif .....	176

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	177
-----------------------------	-----

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman	
1.1	Kinerja PT. XYZ Finance Wilayah Sumut Tahun 2016 .....	7
3.1	Tabel Komposisi Responden Penelitian .....	35
3.2	Klasifikasi Teknik Pengumpulan Data Mix Methode Research .....	39
3.3	Indikator-Indikator Penelitian .....	42
3.4	Kisi-Kisi Wawancara dan Kuesioner Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance .....	43
3.5	Nilai Instrumen Penelitian .....	44
3.6	Interpretasi Nilai Rata-rata Tanggapan Responden .....	47
3.7	Analisis Data Penelitian .....	49
4.1	Tabulasi Responden Karyawan PT. XYZ Finance Wilayah Sumut Menurut Jenis Kelamin .....	59
4.2	Tabulasi Responden Karyawan PT. XYZ Finance Wilayah Sumut Menurut Umur .....	60
4.3	Tabulasi Responden Karyawan PT. XYZ Finance Wiayah Sumut Menurut Tingkat Pendidikan .....	61
4.4	Tabulasi Responden Karyawan PT. XYZ Finance wilayah Sumut Menurut Masa Kerja .....	61
4.5	Tabulasi Responden Karyawan PT. XYZ Finance Wilayah Sumut Menurut Jabatan .....	62
4.6	Tabulasi Responden Karyawan PT. XYZ Finance Wilayah Sumut Menurut Status Perkawinan .....	62
4.7	Tabulasi Responden Karyawan PT. XYZ Finance Wilayah Sumut Menurut Penghasilan .....	63
4.8	Tabulasi Responden Karyawan PT. XYZ Finance Wilayah Sumut Menurut Status Karyawan .....	63

4.9	Uji Validitas Kuesioner .....	64
4.10	Hasil Uji Reliabilitas .....	65
4.11	Deskripsi Pembagian dan Pengembalian Kuesioner .....	66
4.12	Interpretasi Nilai Rata-rata Tanggapan Responden .....	66
4.13	Tabulasi Rata-Rata Jawaban Responden Terhadap Transparansi .....	69
4.14	Tabulasi Rata-Rata Jawaban Responden Terhadap Akuntabilitas .....	70
4.15	Tabulasi Rata-Rata Jawaban Responden Terhadap Pertanggungjawaban .....	73
4.16	Tabulasi Rata-Rata Jawaban Responden Terhadap Independensi .....	75
4.17	Tabulasi Rata-Rata Jawaban Responden Terhadap Kewajaran .....	78
4.18	Jawaban Responden Atas Prinsip Keterbukaan Pada PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	79
4.19	Jawaban Responden Atas Prinsip Akuntabilitas Pada PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	80
4.20	Jawaban Responden Atas Prinsip Pertanggungjawaban Pada PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	81
4.21	Jawaban Responden Atas Prinsip Independensi Pada PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	81
4.22	Jawaban Responden Atas Prinsip Kewajaran Pada PT. XYZ Finance Wilayah Sumut .....	82
4.23	Kategori Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance PT. XYZ Finance wilayah Sumut .....	83
4.24	Uji Triangulasi .....	85
4.25	Summary Hasil Wawancara Informan .....	118
4.26	Model Hasil Penelitian .....	131
4.27	Prinsip dan Pedoman Pelaksanaan GCG .....	136

5.1 Implikasi Penelitian ..... 174



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan di sebuah negara yang meliputi semua sektor kehidupan sangatlah erat dan tidak terpisahkan dengan ketersediaan pembiayaan akan pembangunan, tanpa adanya anggaran dan ketersediaan pembiayaan, maka pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan negara dan harapan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dari warga negara tidak dapat tercapai. Oleh karena itu maka pemerintah melibatkan pihak swasta untuk percepatan dan membantu pemerintah dalam pembangunan. Untuk menyediakan pendanaan tersebut, maka berdirilah Lembaga Keuangan yang didirikan pemerintah sehingga semua transaksi keuangan dalam pembangunan dapat dikoordinir dengan baik dan dana yang terhimpun dapat dipergunakan untuk pembangunan.

Lembaga Keuangan ini seiring dengan waktu dan kebutuhan akan ketersediaan investasi untuk modal dalam pembangunan dan transaksi ekonomi dimasyarakat mengakibatkan pertumbuhan Lembaga-Lembaga Keuangan yang sangat pesat seperti yang disampaikan oleh Marsal dan Salomon (2015) :

*“...The development of money market (which finance companies are participant) smoothen the progress of financial intermediation and boosts lending to the economy and improves the country’s economic and social welfare. Finance companies play a key role in fulfilling the gap of financial services that are not generally provided by the banking sector. The competition among non-bank financial institutions such as development finance institutions, insurance companies, pension funds, mortgage institutions, specialized banks and finance companies, is increasing over the years, which is forcing them to diversify to a wider*

*range of products and services and to provide innovative investment solutions.”*

Jika kita lihat definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan menurut Undang-Undang No.14/1967 Pasal 1 adalah, semua badan yang melalui kegiatan kegiatannya dibidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat.Lembaga Keuangan bank atau bank merupakan Lembaga Keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, di samping menyalurkan dana atau memberipinjaman (kredit) juga usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

Perkembangan Perusahaan Pembiayaan yang begitu pesat dan telah menjadi dan bersatu dengan urat nadi perekonomian di Indonesia, maka pemerintah tidak dapat memandang sebelah mata akan keberadaan dan peranan Perusahaan Pembiayaan tersebut, dengan demikian pengelolaan dan penataan Perusahaan Pembiayaan ini menjadi penting bagi pemerintah Indonesia sehingga peranan dan fungsi Perusahaan Pembiayaan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Khan (2011) :

*“...Corporate governance is the broad term describes the processes, customs, policies, laws and institutions that directs the organizations and corporations in the way they act, administer and control their operations. It works to achieve the goal of the organization and manages the relationship among the stakeholders including the board of directors and the shareholders. It also deals with the accountability of the individuals through a mechanism which reduces the principal-agent problem in the organization. Fine corporate governance is an essential standard for establishing the striking investment environment which is needed by competitive companies to gain strong position in efficient financial markets. Good corporate governance is fundamental to the economies with extensive business background and also facilitates the success for entrepreneurship.”*

Persaingan dunia bisnis saat ini sangat ketat sehingga perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good corporate governance*(GCG). Penerapan *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang tinggi akan berdampak pada nilai perusahaan. *Good corporate governance* dan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. *good corporate governance* adalah yang menjadi mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjaaban kepada para pemegang saham (*shareholder*) khususnya dang pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada umumnya (Nofitasari, dkk 2015).

Penerapan GCG (*good corporate governance*)memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan para pemilik dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Setidaknya upaya peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai melalui peningkatan laba maksimal. Dengan laba yang diperoleh setidaknya perusahaan dapat memberikan deviden kepada para pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan eksistensi. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu konsistensi terutama dalam penerapan GCG (Hamdani, 2016). Dengan demikian GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan dari investor. Kinerja keuangan sangat ditentukan

oleh sejauhmana keseriusan perusahaan dalam menjalankan *good corporate governance* (GCG).

Menurut pendapat Wahyudin Zarkashi (2008) dalam bukunya *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya, mendefinisikan *good corporate governance* merupakan struktur yang digunakan oleh Stakeholders, Shareholders, Komisaris dan Manajer untuk menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan, serta sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan dapat mengawasi kinerja.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri Perusahaan Pembiayaan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014, yang meliputi: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas, pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dengan demikian definisi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara garis besar perusahaan itu harus menuju pengelolaan yang profesional. Ada transparansi, akuntabilitas, ada medianya juga. Nah, tentu kendala ini ketika kita menjalankan hal itu, pertama faktor dari sisi regulasi sangat memengaruhi. Karena regulasi yang sifatnya harus kita ikuti. Dan ketika regulasi berubah-ubah, ini menjadi kendala. Karena *finance company* sendiri belum punya undang-undang sendiri yang mengatur, dasarnya masih peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Pada penelitian ini penulis membahas salah Perusahaan Pembiayaan yang ada di Sumatera Utara dengan pertimbangan akan data-data kerahasiaan perusahaan maka nama Perusahaan Pembiayaan tersebut tidak disebutkan secara

langsung dan disamakan menjadi PT. XYZ Multifinance. Hal ini sudah mendapatkan persetujuan pembimbing dan juga disampaikan nama Perusahaan Pembiayaan yang sebenarnya pada saat seminar proposal, seminar hasil dan siding ujian tesis dan mendapatkan persetujuan dari komisi pembimbing dan penguji. PT. XYZ Multifinance (XYZ Finance), merupakan salah satu Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai bisnis dalam memberikan dan menyediakan fasilitas pembiayaan secara angsuran kepada masyarakat untuk dapat memiliki kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda empat. XYZ Finance saat ini sudah tersebar di sebahagian besar wilayah Kota-Kota besar di Indonesia dengan jumlah kantor perwakilan sampai dengan Januari 2016 tercatat sebanyak 201 Kantor. XYZ Finance juga sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dengan demikian XYZ Finance juga menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Pembiayaan yang salah satunya adalah POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Dengan penerapan dan implementasi POJK No.30/POJK.05/2014 ini dapat mempengaruhi prestasi dan kinerja perusahaan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ichwan dan Nugroho (2013) pada penelitiannya tentang penerapan CGC yang membuktikan bahwa dengan penerapan CGC, maka indikator kinerja dan prestasi perusahaan dapat diperbaiki dan ditingkatkan yaitu :

1. Pembiayaan baru meningkat.
2. Jumlah pembiayaan yang dikelola meningkat
3. Laba bersih meningkat

4. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) relatif stabil
5. Posisi permodalan yang kuat.

Wahyudin Zarkashi (2008) dalam penelitiannya bahwa *Corporate Governance* merupakan sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* dengan baik, seharusnya telah memenuhi prinsip-prinsip GCG yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk overstated, ketidakjujuran dalam financial disclosure yang merugikan para *stakeholders*. Dalam pengambilan keputusan, manajemen memiliki pedoman yang lebih baik sehingga perusahaan menjadi lebih efisien dan akan terhindar dari potensi konflik kepentingan seluruh *stakeholders*.

Trinanda dan Didin Mukodim (2010), Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity, Return On Investment, Return On Asset, dan Net Profit Margin*. Artinya, penerapan *Corporate Governance* yang baik maka akan mengakibatkan kinerja keuangan juga menjadi baik. Hal ini menggambarkan bahwa manajemen perusahaan Calypra, menyadari manfaat jangka panjang dari penerapan *Corporate Governance* yaitu adanya dampak keuangan secara langsung seperti peningkatan laba bersih perusahaan dan akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sehat. Klapper dan Love (2002) dalam Hamdani,

Menguji hubungan antara corporate governance dengan proteksi investor dan kinerja perusahaan di pasar modal sedang berkembang.

Jika kita lihat lebih detail tentang kinerja PT. XYZ Finance, khususnya kinerja cabang-cabang yang ada di wilayah SUMUT terkait dengan pencapaian target di tahun 2016 belumlah tercapai, sehingga permasalahan tata kelola perusahaan yang baik di masing-masing cabang-cabang perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal sesuai target yang dibebankan manajemen. Kinerja tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 :Kinerja PT. XYZ Finance Wilayah Sumut Tahun 2016**

Nama Cabang	Target Sales (Juta)	Realisasi Sales (Juta)	Target NPF (%)	Realisasi NPF (%)	Target Repeat Order (%)	Realisasi Repeat Order (%)
Medan	1000	651	5	9	40	32
Binjai	500	258	5	8	40	12
Lubuk Pakam	500	357	5	11	40	22
Tembung	500	355	5	11	40	34
Delitua	400	122	5	6	40	19
Marelan	600	334	5	9	40	27
Tebing Tinggi	600	558	5	5	40	45
P. Siantar	1000	790	5	4	40	41
Kisaran	400	357	5	5	40	38
Perdagangan	500	659	5	5	40	53
Aek Kanopan	500	219	5	4	40	22
Ranto Prapat	400	224	5	13	40	24
Bagan Batu	400	256	5	6	40	12
Total Sumut	7300	5140	5	9	40	26

**Sumber : PT. XYZ Finance Sumut 2016**

Dari tabel kita lihat target yang dibebankan belum dapat dicapai oleh masing-masing kantor cabang, ini memberikan indikasi bahwa tata kelola bisnis dan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* belumlah dilaksanakan dengan optimal dan masih perlu perbaikan dan melihat kembali aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh masing-masing cabang.

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. XYZ Finance Wilayah Sumut ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. XYZ Finance Wilayah Sumut ?
3. Bagaimana tindakan perbaikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. XYZ Finance Wilayah Sumut ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. XYZ Finance Wilayah Sumut ?
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dan memberikan masukan dan tindakan perbaikan dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. XYZ Finance Wilayah Sumut ?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini agar dapat menjadi :

1. Bagi Penulis, dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bagi perusahaan pembiayaan sesuai dengan POJK No.30/POJK.05/2014 bagaimana prinsip-prinsip *Good*

*Corporate Governance*, Hambatan-Hambatan dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governances*serta tindakan perbaikan untuk prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

2. Bagi Manajemen PT. XYZ Finance, khususnya di Wilayah Sumut agar dapat lebih baik dalam melakukan serta menjalankan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*bagi perusahaan pembiayaan di Wilayah Sumut akan semua lini organisasi, mengetahui cara dalam menjalankan, mengetahui hambatan-hambatan dan menyiapkan tindakan perbaikan yang lebih baik sesuai POJK No. 30/POJK.05/2014.
3. Bagi Akademisi, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian dan tinjauan penelitian sebelumnya dalam melakukan penelitian lanjutan khususnya tentang Implementasi tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur:

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
5. Tidak menarik dana secara langsung.
6. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat

Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, Lembaga Pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana Lembaga

Pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan (Siamat, 2001).

Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 19 November 2015 seluruh Pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan harus mengacu kepada kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tersebut, yaitu meliputi: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Selain kegiatan usaha yang telah disebutkan, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*), dan/ atau kegiatan usaha berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. POJK Nomor 29/POJK.05/2014 ini menggantikan hampir semua bagian dari PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

## 2.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia / FCGI* (2001), pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku

kepentingan (*stakeholders*) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. *Organization For Economic Coperation And Development* (OECD, 2004).

*Malaysian Finance Committe on Corporate Govesrnance* memberikan definisi yang lebih luas mengenai konsep *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta akuntabilitas korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang serta memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (*stakeholder*). *Good Corporate Governance* sering disebut sebagai sebuah pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Tjager, 2003). Hal yang senada juga disampaikan oleh Todorovic (2013) tentang tata kelola perusahaan yang baik yaitu

*“Good corporate governance can help to prevent corporate scandals, fraud, and potential civiland criminal liability of companies. Good corporate governance enhances image and reputationof a company and makes it more attractive to investors, suppliers, customers and other stakeholdersof the company. There is evidence from many researches that good corporate governanceproduces direct economic benefit to the company, making it more profitable and competitive.For investors one of the most important aspects when making an investment decision is levelof implementation of corporate governance principles (public disclosure of information, protectionof shareholder rights and equal treatment of shareholders) and profitability, which ensuresreturn on their investment”.*

Tata kelola perusahaan yang baik meningkatkan citra dan reputasi dari perusahaan dan membuatnya lebih menarik bagi investor, pemasok, pelanggan dan stakeholder lainnya dari perusahaan. Ada bukti dari banyak penelitian bahwa tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan manfaat ekonomi langsung kepada perusahaan, sehingga lebih menguntungkan dan kompetitif. Untuk investor salah satu aspek yang paling penting ketika membuat keputusan investasi adalah tingkat penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (pengungkapan informasi publik, perlindungan hak pemegang saham dan perlakuan yang sama dari pemegang saham) dan profitabilitas, yang menjamin laba atas investasi mereka.

Hamdani (2016) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lainnya sebagai pemangku kepentingan dari perusahaan. GCG atau Tata kelola perusahaan jika kita lihat di Indonesia merupakan terjemahan dari *corporate governance*. Kata *governance* berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu *gouvernance* yang berarti pengendalian (control) atau regulated dan dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang berada dalam kondisi yang terkendali (Subroto, 2005).

Menurut Muh. Arief Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*, pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Hamdani

(2016) juga menyimpulkan defenisi GCG ini dalam pengertian yang luas dan dalam sudut pandang yang sempit yang tidak hanya melihat hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingannya saja.

Peter dan John (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai”... *a set of provisions that enable the stockholders by exercising voting power to compel those in operating control of the firm to respect their interests.*”, yaitu seperangkat peraturan yang memungkinkan para pemegang saham memperoleh dukungan yang mendorong agar pengendalian operasional perusahaan dapat sejalan dan menghormati kepentingan pemegang saham. Cadbury Committee dalam Budiharta & Gusnadi (2008), mengemukakan bahwa *corporate goveranance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan pengaturan hubungan instutisional yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Hamdani, 2016). Hal ini juga senada seperti yang disampaikan Sarbah dan Xiao (2015) jika dilihat dari pengaruhnya terhadap organisasi dinyatakan :

*“In any organization, corporate governance is one of the key factors that determine the health of the system and its ability to survive economic shocks. The health of the organization depends on the underlying soundness of its individual components and the connections between them. Good corporate governance therefore contributes to sustainable economic*

*development by enhancing the performance of companies and increasing their access to outside capital“.*

Dalam setiap organisasi, tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan kesehatan sistem dan kemampuannya untuk bertahan hidup guncangan ekonomi. Kesehatan organisasi tergantung pada tingkat kesehatan yang mendasari nyakomponen individu dan hubungan antara mereka. Oleh karena itu tata kelola perusahaan yang baik memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan akses mereka ke modal luar. Tata kelola perusahaan sangatlah penting dan menjadi dasar untuk melakukan kegiatan perusahaan tersebut.

### **2.3 Tujuan Good Corporate Governance**

Hamdani (2016) menyampaikan bahwa tujuan *Good Corporate Governance* sama dengan sebuah piranti lunak yang dapat menggerakkan organisasi atau perusahaan melalui internalisasi prinsip-prinsip organisasi yaitu : transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. GCG sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Sedangkan tujuannya diharapkan diperoleh manfaat yaitu :

1. Memaksimalkan value Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien.
3. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut.

4. Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan
5. Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten.

Menurut Ahmad Daniri (2005) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaatserta nilai-nilai kepada organisasi atau perusahaan tersebut antara lain:

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*Cost of Capital*).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

#### **2.4 Prinsip - Prinsip Dasar *Good Corporate Governance***

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah menjadi perhatian bagi dunia bisnis di setiap negara. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh OECD(*Organization For Economic Coperation And Development : 2004*) menjadi acuan bagi setiap negara dalam penerapannya. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh OECD tahun 2004 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Ensuring the basis for an Effective Corporate Governance Framework*
2. *The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions*
3. *The Equitable Treatment of shareholders*
4. *The Role of Stakeholders in Corporate Governance*
5. *Disclosure and Transparency*

## 6. *The responsibilities of the Board*

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, masing-masing negara selanjutnya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam Pedoman *Good Corporate Governance* masing-masing negara. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesiakan disusun oleh Komite nasional Kebijakan Governance. Pedoman yang diterbitkan pada tahun 2006 ini merupakan revisi atas Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada tahun 2001. Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 danKNKG (2009), prinsip-prinsip GCG adalah :

1. Transparansi (*Transparency*),
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*),
4. Independensi (*Independency*),
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*),

Prinsip - prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud padaayat (1) POJK No. 30/POJK.05/2014 meliputi :

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;

4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Sedangkan prinsip-prinsip menurut Iman S.Tunggal dan Amin W.

Tunggal (2002) yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The rights of shareholders*).
2. Persamaan perlakuan terhadap pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*).
3. Peranan shareholders yang terkait dengan perusahaan (*The role of shareholders*).
4. Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and transparency*).
5. Akuntabilitas dewan komisaris (*The responsibilities of the board*).

Iman dan Amin (2002) menambahkan untuk definisi Transparansi yaitu pengungkapan informasi kinerja perusahaan, baik ketepatan waktu maupun akurasi (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality, standardization, efficiency time and cost*). Akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioners, board of directors, shareholders*, dan auditor (pertanggungjawaban wewenang, *traceable, reasonable*).

Iman dan Amin (2002), juga menyebutkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan berada. Menurut Iman dan Amin (2002), kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain

yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini, ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, komisaris, direksi, dan manajer atau pihak-pihak yang diberitugas untuk mengelola kegiatan perusahaan terbebas dari tekanan ataupun pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Ditambahkan oleh Iman dan Amin (2002), dalam hal ini adanya suatu perlindungan kepentingan minority shareholders dari penipuan, kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*selfdealing* atau *insider trading*). *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam.

Hamdani (2016) juga menyampaikan definisi prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Dalam pengelolaan perusahaan diharapkan manajemen dapat bertindak secara transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang tidak boleh ada intervensi dari pihak-pihak diluar perusahaan. Implikasi prinsip-prinsip tersebut setidaknya dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi semua pihak, baik internal perusahaan maupun pihak diluar perusahaan (Hamdani 2016).

## **2.5 Metode dan Ruang Lingkup Penerapan *Good Corporate Governance***

### **2.5.1 Metode Penerapan *Good Corporate Governance***

KNKG (2009), menyampaikan bahwa Pelaksanaan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka (Emiten/Perusahaan Publik) maupun perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat *comply and explain*. Di mana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek Pedoman Good Corporate Governance ini. Apabila belum seluruh aspek pedoman ini dilaksanakan maka perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya dalam laporan tahunan. Namun beberapa substansi yang terdapat dalam pedoman ini diadopsi oleh Bapepam-LK ke dalam peraturan-peraturan Bapepam-LK yang sifatnya mandatory seperti kewajiban pembentukan komite audit dan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan. GCG sangat ditentukan oleh peran negara, dunia usaha dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa.

Peran negara terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha, sementara para pelaku pasar menjadikan GCG sebagai pedoman dalam praktik bisnis (Hamdani, 2016). Dengan cara demikian, Bapepam-LK dapat memberikan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut. Lebih lanjut, Bapepam-LK juga mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan seperti frekuensi rapat dewan komisaris dan direksi, frekuensi kehadiran anggota dewan komisaris dan direksi dalam rapat tersebut, frekuensi rapat dan kehadiran komite audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dewan komisaris dan direksi serta remunerasi dewan komisaris dan direksi (KNKG, 2009).

### **2.5.2 Ruang Lingkup Penerapan *Good Corporate Governance***

GCG dalam setiap negara terdapat perbedaan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerangka hukum, maupun hal-hal yang tidak tertulis (Hamdani, 2016). Sesuai dengan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan Good Corporate Governance yang merupakan standar minimal yang mencakup:

1. Peran negara, dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan *Good Corporate Governance*
2. Asas-asas *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan
3. Nilai-nilai perusahaan, Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku
4. Organ Perusahaan

Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

### 2.5.3 Pedoman Praktis Penerapan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan GCG. Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 75 sampai dengan pasal 91, RUPS merupakan sebuah forum dimana para Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai perusahaan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Informasi-informasi itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perusahaan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS, mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya.

Dalam forum RUPS, para peserta tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semua Pemegang Saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itu dengan suara bulat. RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan. Selanjutnya Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham (UU No. 40 Tahun 2007).

Sebagai sebuah forum, pada prinsipnya RUPS harus diselenggarakan di Indonesia. Penyelenggaraan itu dilakukan di tempat kedudukan perusahaan atau ditempat perusahaan melakukan kegiatan operasional. Selain di tempat perusahaan, RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik, misalnya media telekonferensi atau video konferensi. Semua peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media elektronik harus bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Meskipun sifatnya telekonferensi, RUPS itu juga harus dibuatkan risalah rapatnya dan ditandatangani oleh semua peserta rapat. Jenis RUPS dapat terdiri dari :

1. RUPS Tahunan adalah RUPS yang wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroan.
2. RUPS Lainnya adalah RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud. Keputusan Pemegang Saham ini mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik (UU No. 40 Tahun 2007).

## 2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan CGC

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan GCG pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
  2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
  3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
  4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
  5. Dukungan dari pihak stakeholders.
  6. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.
- Penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan yang

menentukan keberhasilannya yaitu faktor internal dan eksternal dari sebuah organisasi/perusahaan, faktor-faktor tersebut dijelaskan dibawah ini, seperti dikutip dari Hamdani (2016) :

1. Faktor Internal Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa factor yang dimaksud antara lain:
  - a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
  - b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
  - c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
  - d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
  - e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
2. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya adalah :

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan. Jika berbagai prinsip dan aspek penting GCG dilanggar suatu perusahaan, maka sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global dewasa ini, meski perusahaan itu memiliki lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya.

## 2.7 Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG

Dalam KNKG (2009), Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Perusahaan dan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) dapat melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Penilaian (*assessment*)

Penilaian (*assessment*) adalah program untuk mengidentifikasi implementasi GCG pada perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di perusahaan/BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Sebelum melakukan penilaian didahului dengan mensosialisasikan GCG pada semua lapisan Perusahaan/BUMN. Penilaian dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses dan ketentuan yang berlaku. Penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang ditunjuk oleh Direksi secara langsung. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN/KNKG. Sebelum melaksanakan penilaian, penilai menandatangani perjanjian kerjadengan Direksi BUMN yang terkait. Perjanjian tersebut mengatur tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan. Hasil penilaian dilaporkan kepada RUPS/ Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

2. Evaluasi (*review*)

Evaluasi (*review*) adalah program untuk menggambarkan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang mencakup evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas perbaikan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh BUMN itu

sendiri (self assessment). Dalam pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh penilai independen atau Jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten, tetapi penilai independen atau Jasa Instansi Pemerintah tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan.

## 2.8 Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang bagaimana prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan khususnya bagi perusahaan pembiayaan sesuai dengan latar belakang, maka pada penelitian ini. Peneliti membatasi pada pembahasan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan mencakup Kantor Wilayah SUMUT dan Kantor Cabang yang ada di Wilayah SUMUT tentang Implementasi tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan yang dilakukan masing-masing Pimpinan dan Karyawan yang ada.

## 2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan pengaruh praktik GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut: Nugroho (2014) menganalisis *pengaruh corporate social responsibility (CSR)* dan karakteristik *good corporate*

*governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSR, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *return on equity* (ROE).

Jati (2009) menganalisis pengaruh dari struktur corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur *corporate governance*. Struktur *corporate governance* yang digunakan meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi, dan keberadaan komite audit. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang diukur adalah *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *struktur corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE.

Supatmi (2007) meneliti hubungan antara corporate governance dengan kinerja keuangan. Sampel penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang memperoleh peringkat baik dalam penerapan *corporate governance* menurut IICG dan yang dipublikasikan di Majalah SWA. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana mulai tahun 2001-2004. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu hanya perusahaan non-financial

yang menerbitkan laporan keuangan sejak mendapat peringkat CGPI hingga dua tahun sesudahnya.

Bukhori (2012) meneliti pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Variabel yang diuji adalah ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris sebagai mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan CFROA (*Cash Flow Return On Asset*). Pengumpulan data menggunakan metode random sampling terhadap perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sebanyak 160 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Saraswati (2012) menguji kembali pengaruh *corporate governance* dengan *corporate social responsibility* dan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah nilai perusahaan sebagai variabel dependen, *Corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel independen, dan *corporate governance* sebagai variabel moderating. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel yang digunakan dipilih melalui metode purposive sampling. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin's Q) namun dengan arah negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR yang lebih luas justru cenderung menurunkan nilai perusahaan. Ramdhaningsih dan Utama (2013) menganalisis

pengaruh *indikator good corporate governance* (GCG) dan profitabilitas pada pengungkapan *corporate social responsibility* CSR. Penelitian ini dikhususkan pada perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 dengan 30 sampel penelitian yang diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*.

Terkait dengan indikator *good corporate governance* tersebut, proksi yang digunakan antara lain: ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sedangkan rasio profitabilitas menggunakan *rasio return on equity* (ROE). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR, sementara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR.

V. Titi Purwantini (2012) Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Memakai struktur kepemilikan terkonstruksi Memakai indikator dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan regresi berganda, uji signifikansi parameter individu dengan ROA, ROE Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan tetapi tidak signifikan. Kepemilikan Institusional mempengaruhi

nilai perusahaan secara negative Kepemilikan terkonsentrasimempengaruhi secara positif nilai perusahaan dan kinerja keuangan.

Fenny Wijaya(2007) Bagaimana gambaran penerapan GCG pada PT Astra Internasional Tbk ? dan Bagaimana kualitas tata kelola perusahaan PT Astra Tbk ? Penelitian explanatory dengan pendekatan *case study*. Data diperoleh dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penerapan GCG pada PT Astra Internasional Tbk telah disosialisasikan, dilaksanakan, direview pelaksanaannya, dan secara konsisten terus ditingkatkan implementasinya. Kekurangan dalam penerapan GCG yang perlu diperbaiki dalam hal isi dari website. Kurangnya pengungkapan atas risiko oleh perusahaan. Tidak adanya komite GCG dalam perusahaan. Cheesy Sundae Fluff(2007) Apakah penerapan GCG pada PT Krakatau Steel (Persero) sesuai dengan kebijakan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan perusahaan yang baik ? Apakah ada kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG ? Penelitian: explanatory. Metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan. PT Krakatau Steel (Persero) belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG ke dalam tubuh perusahaan. Belum optimalnya kinerja para Direksi dan Komisaris dalam mendukung terciptanya GCG menjadi salah satu penyebabnya. Sosialisasi yang kurang tentang penerapan GCG juga dapat mengakibatkan kurang pedulinya karyawan terhadap praktek GCG. Pemilihan dan pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan Komite Audit charter yang ada.

## 2.10 Research Gap

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang penerapan GCG pada Organisasi Pemerintah (BUMN) dan Swasta dengan skala lokal, nasional dan internasional. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan Fluff (2007), Wijaya (2007), Purwantini (2012), Saraswati (2012), Bukhori (2012), Ramdhaningsih dan Utama (2013), yang mempergunakan pendekatan ROA dan ROE kemudian CSR, dan Prinsip-Prinsip GCG dilihat hubungannya dengan Nilai dan Kinerja Perusahaan.

Pada penelitian ini, Peneliti mempergunakan pendekatan yang tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Objek penelitian juga berbeda bisnisnya yang merupakan perusahaan pembiayaan konsumen yang berbeda dengan perusahaan BUMN dan manufaktur/Pabrik serta fenomena-fenomena yang menarik dengan pengaturan dan pengawasan perusahaan pembiayaan dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini tingkat pertumbuhannya sudah signifikan dalam perekonomian Indonesia. Pada penelitian ini tidak dipergunakan pengukuran ROA dan ROE serta CSR dan nilai perusahaan pembiayaan, melainkan pendekatan studi kasus bagaimana prinsip-prinsip tata kelola dan hambatan-hambatan serta tindakan perbaikan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Penelitian tentang tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di Perusahaan Pembiayaan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi/Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam tesis ini adalah PT. XYZ Finance Wilayah SUMUT yang meliputi Kantor Perwakilan Medan, Lubuk Pakam, Binjai, Marelan, Delitua, Tembung, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Perdagangan, Kisaran, Aek Kanopan, Rantau Prapat dan Bagan Batu, alasan pemilihan objek penelitian adalah Peneliti melihat fenomena-fenomena perkembangan pertumbuhan Industri Pembiayaan Konsumen dan Moment Lahirnya OJK sebagai Lembaga Independen yang Mengatur dan Mengawasi Lembaga Keuangan di Indonesia yang sudah mengeluarkan POJK tentang tata kelola perusahaan pembiayaan tersebut. Pemilihan PT. XYZ Finance sebagai objek penelitian berdasarkan perkembangan PT. XYZ Finance yang cukup cepat dan di Wilayah SUMUT terdapat Kantor-Kantor Perwakilan di Kabupaten/Kota di Wilayah SUMUT yang berperan dalam perekonomian Lokal dan Regional SUMUT.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kombinasi (*Mixed Methods Research*), yang Menurut Sugiyono (2014), dalam bukunya Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methode Research*). Penelitian kombinasi adalah merupakan penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan

menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Metode kombinasi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada satu penelitian. Metode penelitian kombinasi akan berguna bila metode kuantitatif atau metode kualitatif secara sendiri-sendiri tidak cukup akurat digunakan untuk memahami permasalahan penelitian, atau dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi akan dapat memperoleh pemahaman yang paling baik (bila dibandingkan dengan satu metode).

Penelitian kombinasi (*Mixed Methods Research*), dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan di PT. XYZ Finance Wilayah SUMUT.

### 3.3 Responden Penelitian

Responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hanya para Pimpinan dengan Level Supervisor sampai dengan Manager dari masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah PT. XYZ Finance Wilayah SUMUT dan ditambah Manager Area wilayah Sumut dan Koordinator Wilayah Sumut, serta Team Audit yang sudah penulis tetapkan dengan dasar pertimbangan jabatan manajerial dan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola divisi dan kantor cabang masing-masing, dan ditambah dengan konsumen PT. XYZ Finance dan Mitra Kerja/Supplier. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan Nonprobability Sampling Design yaitu dengan menggunakan purposive sampling. Untuk konsumen dan supplier diambil sampelnya secara acak (*simple random sampling*) dan tidak diambil dari masing-masing kantor cabang,

melainkan hanya dikantor cabang Medan yang merupakan representatif PT. XZY Finance.

Pengertian Nonprobability sampling menurut Sugiyono (2010) merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengertian purposive sampling menurut Sugiyono (2014) yaitu :purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Untuk informan penulis memilih langsung jabatan-jabatan koordinator di Kantor Wilayah XYZ Finance Sumbagut dikarenakan kegiatan operasional masing-masing fungsi yang ada dicabang-cabang dikoordinir oleh Manager Area/Head yang ada di Kantor Wilayah, dan konfirmasi kepada konsumen dan mitra kerja/supplier. Komposisi Responden seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1 : Tabel Komposisi Responden Penelitian**

No	Nama Kantor	Jabatan		Jlh Karyawan	Jlh Responden Kuesioner	Jlh Informan Wawancara
		Staf (Non Mgr)	Manager			
1	Wilayah Sumut	30	10	40	10	1
2	Medan	60	5	65	5	
3	Binjai	30	4	34	4	
4	Tembung	25	4	29	4	
5	Lubuk Pakam	30	4	34	4	
6	Delitua	20	2	22	2	
7	Marelan	30	4	34	4	
8	Pajak Melati	10	2	12	2	
9	Tebing Tinggi	25	4	29	4	
10	Pematang Siantar	55	5	60	5	
11	Perdagangan	30	4	34	4	
12	Kisaran	20	3	23	3	
13	Aek Kanopan	15	3	18	3	
14	Rantau Prapat	25	4	29	4	
15	Bagan Batu	15	3	18	3	
16	Head CA		1	1	1	1
17	Head DS (Sales)		1	1	1	1
17	Head HRD		1	1	1	1
18	Head Audit		1	1	1	1
19	Konsumen					5
20	Supplier/Mitra					3

Total	420	65	485	65	12
-------	-----	----	-----	----	----

*Sumber PT. XYZ Finance Wilayah SUMUT 2016*

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 jenis yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung pada perusahaan, hasil wawancara dengan para karyawan PT. XYZ Finance Finance, Wilayah SUMUT dengan Para Manager dan General Manager Wilayah Sumut dan Direktur Marketing dan Risk Management serta perwakilan Team Auditor Internal, untuk mendapatkan gambaran kondisi sesungguhnya.
2. Data skunder diperoleh dengan mengambil data dan dokumen, laporan tertulis yang diolah sesuai kebutuhan serta literatur-literatur yang relevan dengan lingkup kajian berupa data profil perusahaan serta buku-buku yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Literasi Yang dikeluarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Riset Perpustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dikaji yang dapat diperoleh dari literatur, jurnal, penelitian terdahulu dan buku-buku yang telah diterbitkan.

2. Riset Lapangan, yaitu mengumpulkan data-data secara langsung ke perusahaan yang sedang diteliti dengan melakukan wawancara dengan responden.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2014) yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data, fakta dan keterangan melalui sebuah penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

#### 1. Kuesioner

Pengertian metode angket atau kuesioner menurut Sugiono (2014) “Angket atau kuesioner adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui”. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Berupa daftar pertanyaan atau angket tertulis. Sampel yang sesuai dengan karakteristik diberi kuesioner mengenai masalah penelitian.

## 2. **Dokumentasi**(*Library Research*)

Menurut Sugiono (2014) “Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.” Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu peraturan tertulis, dan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari perpustakaan, meliputi buku-buku ilmiah, jurnal, karya tulis, dan atau majalah-majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

## 3. **Internet Research**

Peneliti menggunakan Internet untuk mencari dan melakukan download (unduh) atas publikasi ilmiah yang ada berupa hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, dan peraturan-peraturan perundang-undangan serta situs resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memuat kontent tentang OJK.

## 4. **Interview/wawancara**

Merupakan daftar pertanyaan sebagai bahan interview awal dengan karyawan dan pimpinan yang berguna untuk sebagai menguatkan informasi dan alasan yang digunakan pada latar belakang masalah dan ditambah dengan *indept interview* untuk mengkonfirmasi kembali jawaban responden atas kuesioner yang diberikan.

## 5. **Participan Observer**

Peneliti memasuki organisasi atau lingkungan penelitian dan menjadi bagian dari tim kerja, mengamati kondisi sehari-hari yang ada dan memformulasikannya dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam (Sugiono 2009).

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan jenis penelitian kombinasi (*Mix Methode Research*) yaitu kuantitatif dan kualitatif maka penggunaan teknik pengumpulan data untuk masing-masing pembahasan digambarkan seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2 : Klasifikasi Teknik Pengumpulan Data *Mix Methode Research***

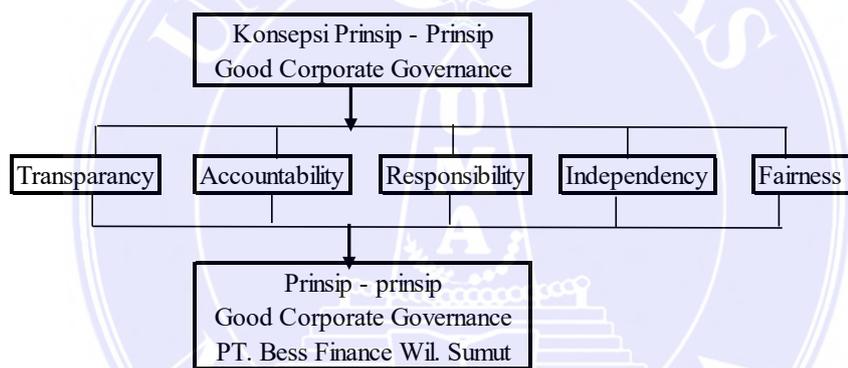
Pembahasan Penelitian	Teknik Pengumpulan Data
Kuantitatif	- Kuesioner
Kualitatif	- Dokumentasi - Wawancara - <i>Internet Reseach</i> - <i>Participan Observer</i>

### 3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012), definisi operasional adalah penentuan konstrakatau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk menelitidan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yanglain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama ataumengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Menurut Singarimbun dan Efendi (2002), definisi operasional ataumengoperasionalisasi variabel adalah petunjuk bagaimana suatu veriabeldiukur, dengan membaca definisi operasional dalam penelitian makadiketahui baik buruknya variabel tersebut .

### 3.6.1 Definisi Operasional

Prinsip - Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan OECD (*Organization For Economic Coperation And Development : 2004*), KNKG (2006) dan POJK No.30/POJK.05/2014 dan Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002), yang sudah penulis rangkum dapat digambarkan kerangka berpikir prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. XYZ Finance yaitu :



1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Kejelasan fungsi

dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya . Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk keperluan pembahasan dan pengujian, variabel penelitian tersebut baik secara kuantitatif dan kualitatif perlu dijabarkan ke dalam indikator - indikator yang bersangkutan. Adapun indikator-indikator dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 : Indikator-Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Pembahasan	Skala Pengukuran	Instrumen
Prinsip - Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	- Transparansi	Kuantitatif	Ordinal	Kuesioner
	- Accountabilitas			
	- Responsibilitas			
	- Independensi			
	- Kesetaraan dan Kewajaran	Kualitatif		Wawancara

Indikator-indikator tersebut kemudian dioperasionalkan dalam bentuk item-item pertanyaan berupa daftar pertanyaan yang akan berikan dan di isi oleh responden dan daftar wawancara yang akan di sampaikan kepada responden

dengan harapan dapat di isi dengan baik dan dijawab dengan baik sesuai dengan kondisi.

**Tabel 3.4 : Kisi-Kisi Wawancara dan Kuesioner Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Jumlah Pertanyaan	Jumlah Kuesioner
Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance	Keterbukaan	• Informasi Publik	1	5
		• Keterbukaan	1	
		• Kebijakan	1	
		• Tepat Waktu	1	
		• Informasi Nasabah	1	
	Akuntabilitas	• Tanggungjawab jelas • Kompetensi • Ukuran Kinerja • Implementasi GCG	1	4
			1	
			1	
			1	
	Pertanggungjawaban	• Prinsip Kehati-hatian • Sistem dan Prosedur Kerja • Tanggungjawab Sosial (CSR)	1	3
			1	
			1	
	Kemandirian	• Penyelesaian Masalah • Objektivitas • Administratif	1	3
			1	
			1	
	Kesetaraan dan kewajaran	• Persamaan • Keadilan • Etika Kerja	1	3
			1	
			1	
Total			18	18

### 3.6.2 Pengukuran Instrumen Penelitian

Teknik pengukuran yang digunakan untuk menghitung kuesioner adalah dengan menggunakan skala likert, yaitu metode yang mengukur sikap yang menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek atau kejadian tertentu. Tolak ukur yang disampaikan adalah pengisian poin-poin kuesioner yang dibagikan kepada responden berupa skala likert. Dengan skala ini, responden

diminta untuk memberikan respon dari setiap pernyataan dengan memilih salah satu dari lima alternative pilihan jawaban. Karena jawaban tersebut dapat mencerminkan sikap ekstrim, sehingga penulis dapat menganalisis secara mendalam mengenai pola-pola respon dari setiap pernyataan yang ada (Sugioyono, 2014). Pengukuran dan nilai dari masing-masing jawaban responden sesuai dengan skala likert seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5 : Nilai Instrumen Penelitian**

Jawaban	Nilai (Skala)	Maknanya
SB : Sangat Baik	5	Jawaban ini untuk pernyataan kuesioner yang sangat didukung oleh pihak manajemen atas penerapan prinsip GCG
B:Baik	4	Jawaban ini untuk pernyataan kuesioner yang cukup didukung oleh pihak manajemen atas penerapan prinsip GCG
KB:Kurang Baik	3	Jawaban ini untuk pernyataan kuesioner yang tidak didukung oleh pihak manajemen atas penerapan prinsip GCG
TB:Tidak Baik	2	Jawaban ini untuk pernyataan kuesioner yang ditolak oleh pihak manajemen atas penerapan prinsip GCG
STB:Sangat Tidak Baik	1	Jawaban ini untuk pernyataan kuesioner yang sangat ditolak oleh pihak manajemen atas penerapan prinsip GCG

**Sumber : Diolah dari Sugiono (2014)**

Untuk pengujian variabel-variabel yang diteliti diperlukan suatu pengujian yang valid dan reliabel. Hal tersebut diperlukan agar penelitian menjadi tidak keliru dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk variabel penelitian tersebut perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas Sugiyono (2014).

### 1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2009) valid dapat didefinisikan sebagai berikut: “ valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya

diukur“. Dengan demikian untuk mengukur sesuatu harus menggunakan instrument atau alat yang tepat. Kriteria yang digunakan adalah:

Jika  $t$  hitung  $\geq t$  tabel , maka pernyataan dikatakan valid

Jika  $t$  hitung  $< t$  tabel , maka pernyataan dikatakan tidak valid

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi Pearson Validity dengan teknik Product Moment yaitu setiap skor tiap item dikorelasikan dengan skor total. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka data dapat dikatakan valid. Syarat minimal untuk memenuhi syarat validitas jika  $r \geq 0.3$ , jika  $r \leq 0.3$ , maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiono 2009), rumus perhitungan nilai  $r$  tersebut seperti dibawah ini :

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{(n \sum i^2 - (\sum i)^2)(n \sum x^2 - (\sum x)^2)}}$$

Dengan :  $r_{ix}$  = koefisien korelasi

$i$  = skor item

$x$  = skor total

$n$  = banyaknya subjek

## 2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2009) “ instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur instrument yang sama akan menghasilkan data yang sama”. Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Suatu alat dikatakan handal

jika nilai cronbach alpha > 0,60. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus cronbach alpha sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Dengan  $r_{11} = \text{reabilitas instrumen}$   
 $k = \text{jumlah item kuesioner}$

### 3.7 Teknik Analisis Data

#### 1. Statistik Deskriptif

Instrumen yang digunakan untuk menguji variabel yang diteliti dinamakan kuisisioner. Kuisisioner yang diisi sendiri oleh responden sangat menentukan kualitas keabsahan data penelitian. Hal tersebut dipengaruhi oleh keunggulan responden, kesungguhan responden, situasi lingkungan, dan alat pengukuran itu sendiri (Sugiono 2009). Statistik itu sendiri mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan, dan menganalisis data sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Sugiono 2009).

Untuk menghitung masing-masing item pertanyaan yang disampaikan kepada responden, sehingga jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat disimpulkan, maka dipergunakan interpretasi nilai rata-rata jawaban responden

sesuai yang disampaikan oleh Sudjana (2000) yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{\text{Rentang Nilai}}{\text{Banyak Kelas Interval}}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} \text{Rentang Nilai} &= \text{Nilai Tertinggi-Nilai Terendah} \\ \text{Nilai Tertinggi} &= 5 \\ \text{Nilai Terendah} &= 1 \\ \text{Banyak Kelas Interval} &= 5 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval adalah :

$$\begin{aligned} \text{Panjang Interval} &= \frac{5-1}{5} \\ \text{Panjang Interval} &= 0,8 \end{aligned}$$

**Tabel 3.6 : Interpretasi Nilai Rata-rata Tanggapan Responden**

Nilai	Keterangan
4,20-5,00	Sangat Baik
3,40-4,19	Baik
2,60-3,39	Kurang Baik
1,80-2,59	Tidak Baik
1,00-2,79	Sangat Tidak Baik

*Sumber : Diolah dari Sudjana, 2000*

Untuk penilaian terhadap kategori prinsip-prinsip *good corporate governance* di PT. XYZ Finance Sumut, penulis mempergunakan formulasi menurut Sugiono (2009) adalah sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Skor kuersioner tertinggi} \times \text{jumlah kuersioner} \times \text{jumlah responden})}{(\text{Skor kuersioner tertinggi})}$$

$$\frac{(\text{Skor kuersioner tertinggi})}{(\text{Skor kuersioner tertinggi})}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah item kuersioner} &= 18 \\ \text{Nilai jawaban tertinggi} &= 5 \\ \text{Nilai jawaban terendah} &= 1 \\ \text{Jumlah Responden} &= 65 \\ \text{Nilai tertinggi} (5 \times 18 \times 65) &= 5.850 \end{aligned}$$

Nilai tertendah  $(1 \times 18 \times 65) = 1.170$

Sehingga diperoleh pedoman dalam penilaian prinsip-prinsip CGC pada PT.

XYZ Finance wilayah Sumut diolah sesuai dengan Sugiono (2009) yaitu :

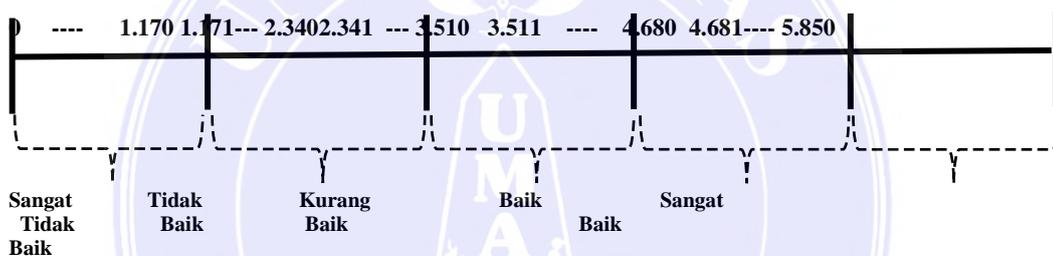
Skor 0-1.170 = Prinsip-Prinsip GCG Sangat Tidak Baik di PT. XYZ Finance

Skor 1.170-2.340 = Prinsip-Prinsip GCG Tidak Baik di PT. XYZ Finance

Skor 2.341-3.510 = Prinsip-Prinsip GCG Kurang Baik di PT. XYZ Finance

Skor 3.511-4.680 = Prinsip-Prinsip GCG Baik di PT. XYZ Finance

Skor 4.681-5850 = Prinsip-Prinsip GCG Sangat Baik di PT. XYZ Finance



2. Uji *credibility* (validitas internal) dengan Triangulasi Teknik, Dalam Sugiyono, (2008) “*trangulasi teknik untuk mengujikredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.*” Jadi *trangulasi teknik* adalah mencari informasi pada orang yang sama atau objek yang sama dengan menggunakan cara atau teknik yang berbeda.

3. *Transferability* (Validitas Eksternal), “*Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil menurut Sugiyono, (2008).*” Jadi, agar hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat dipahami oleh orang lain dan kemudian hasil

penelitian ini mampuditerapkan oleh orang lain, maka penulisan laporan harus dilakukan denganmemberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

**Tabel 3.7 : Analisis Data Penelitian**

Variabel	Indikator	Pembahasan	Skala Pengukuran	Instrumen	Analisis Data
Prinsip - Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Accountabilitas</li> <li>- Responsibilitas</li> <li>- Independensi</li> <li>- Kesetaraan dan Kewajaran</li> </ul>	Kuantitatif	Ordinal	Kuesioner	Statistik Deskriptif
		Kualitatif		Wawancara	Uji credibility Transferability

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Kesimpulan Kuantitatif**

1. PT. XYZ Finance wilayah Sumut menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada semua kantor-kantor perwakilan di wilayah Sumut.
2. Prinsip keterbukaan (*transparency*) pada PT. XYZ Finance Wilayah Sumut dikategorikan baik.
3. Prinsip akuntabilitas (*accountability*) pada PT. XYZ Finance Wilayah Sumut dikategorikan baik.
4. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) pada PT. XYZ Finance Wilayah Sumut dikategorikan kurang baik
5. Prinsip independensi (*independency*) pada PT. XYZ Finance Wilayah Sumut dikategorikan kurang baik.
6. Prinsip kewajaran (*fairness*) pada PT. XYZ Finance Wilayah dikategorikan kurang baik. Total nilai yang diperoleh untuk prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT. XYZ Finance di wilayah Sumut berada pada wilayah baik.

##### **5.1.2 Kesimpulan Kualitatif**

1. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan

untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan Perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham khususnya, dan para pemangku kepentingan pada umumnya.

2. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh XYZ Finance tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia XYZ Finance sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
3. Prinsip responsibilitas, XYZ Finance telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi XYZ Finance dan seluruh jajaran XYZ Finance mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*.
4. Prinsip akuntabilitas, terutama tentang CSR yang dimana XYZ Finance Sumut belum sepenuhnya bertindak sebagai warga perusahaan yang baik (*Good Corporate Citizen/GCC*) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
5. Dalama hal independensi, XYZ Finance mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan, dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasi dan didokumentasi dengan baik.
6. Tentang kewajaran (*fairness*) termasuk masih kurang baik adengan etika kerja/etika bisnis telah dibuat dan disebarluaskan serta dilakukan evaluasi

terhadap penerapannya untuk menjaga hubungan dengan pihak lain baik dengan pemegang saham, kreditor, nasabah maupun dengan pihak berkepentingan lainnya (stakeholders).

7. Tata Kelola Perusahaan bagi Perseroan sangat penting karena menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab/mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham.
8. Penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan faktor internal, adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan dan faktor eksternal, adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG.
9. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hal-hal yang menjadi penghambat keberhasilan GCG di PT. XYZ Finance wilayah Sumut yang tidak akan terlepas dari kondisi lingkungan yang melandasinya.

## **5.2 Implikasi Penelitian**

1. Sosialisasi tentang pekerjaan dan hal-hal yang baru termasuk nilai-nilai dan budaya serta GCG pada PT. XYZ Finance wajib sering dilakukan dan berulang-ulang, dengan demikian akan memberikan pemahaman tentang tugas serta tanggungjawab karyawan dalam bekerja.

2. Teman sejawat sangat membantu dari segi moral terutama tim kerja, Karena seberat apapun pekerjaan jika dikerjakan dengan kerjasama akan terasa ringan. Teman sejawat akan menjadi motivator.
3. Proses pemberian kredit yang ketat dengan melakukan survey kepada calon konsumen, verifikasi data konsumen serta melakukan segmentasi konsumen berdasarkan wilayah, type motor dan jenis pekerjaan.XYZ Finance harus juga menerapkan strategi penagihan yang efektif dan efisien dengan penanganan kredit bermasalah yang ditangani oleh team khusus
4. Pengendalian operasional secara terpusat dan secara konsisten melaksanakan audit operasional sehingga tercipta kontrol yang baik serta secara kontinu memberikan pelatihan kepada karyawan khususnya karyawan tenaga lapangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga lapangan dalam melakukan survey atau verifikasi, penagihan (*collection*) hingga penarikan kendaraan atas kredit yang bermasalah
5. Menjalin hubungan yang baik secara berkesinambungan dengan pemasok dan melakukan komunikasi yang intensif sehingga bisa memperoleh informasi mengenai ketersediaan barang sehingga bias segera mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan serta terhadap risiko permintaan konsumen Perseroan secara kontiniu bekerjasama dengan pemasok untuk menyediakan paket pembiayaan yang inovatif dan menguntungkan bagi konsumen untuk meningkatkan permintaan konsumen.

6. Penerapan Prinsip Mengenal Konsumen Bagi Perusahaan Pembiayaan, penanggung jawab PMN juga harus melakukan evaluasi atas identifikasi rekening dan pelaksanaan transaksi konsumen, termasuk menganalisis laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan/atau laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) yang disampaikan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan.
7. Mengembangkan system teknologi informasi yang online dan integrated yang tepat guna untuk mendukung peningkatan kinerja, proses dan operasional Perseroan di semua jaringan di seluruh Sumut.
8. Memberikan informasi kepada internal karyawan melalui media komunikasi karyawan (Buletin XYZ) yang diterbitkan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun antara lain menyediakan informasi mengenai kegiatan manajemen, prospek, kegiatan XYZ Finance, kegiatan karyawan, penghargaan dan kinerja usaha XYZ Finance. XYZ Finance harus juga memiliki jaringan intranet (Portal) yang menyediakan informasi tentang perkembangan operasional, training karyawan, kegiatan XYZ Finance dan program pemasaran
9. Perusahaan bekerjasama dengan dealer-dealer terpilih dengan menyediakan mesin EDC di tempat dealer-dealer tersebut, selain juga menyediakan mesin EDC di jaringan usaha Perusahaan. Dengan memanfaatkan jasa layanan ini, konsumen dapat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan secara akurat, aman dan tepat waktu di dealer atau jaringan usaha yang terdekat. Perusahaan juga bekerjasama dengan PT Pos

Indonesia (Persero) untuk melayani konsumen Perusahaan yang secara lokasi bisa dijangkau oleh kantor pos, baik secara *on-line* maupun *off-line* tergantung pada tersedianya infrastruktur di wilayah tersebut.

10. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat dan menghargai keberagaman. Penetapan target bisnis Perusahaan senantiasa diikuti oleh strategi pengelolaan SDM yang tepat. Bagi XYZ Finance, pengelolaan SDM tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuankaryawan, namun juga memunculkan potensi yang dimiliki setiap karyawan secara optimal.
11. Proses rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang ada. Proses dan implementasi rekrutmen juga sejalan dengan perkembangan XYZ Finance untuk mencetak pemimpin-pemimpin kompeten yang memiliki nilai-nilai dasar dan budaya XYZ Finance dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin; baik di kantor cabang maupun pusat.
12. Ketepatan dan keselarasan KPI karyawan dengan tujuan organisasi sangat berpengaruh pada kesuksesan dalam pencapaian target -target Perusahaan. Sistem penilaian ini berlaku secara transparan dan berbasis pada pencapaian kinerja guna menciptakan pemahaman bersama bagi setiap jenjang dalam organisasi perihal tujuan dan target Perusahaan. Melalui sistem penilaian ini, atasan dan bawahan diharapkan mengenal target

bersama dan dapat menyusun rancangan kerja untuk mencapai tujuan tersebut.

13. Perusahaan harus membina hubungan industrial sesuai dengan peraturanketenagakerjaan yang berlaku. Setiap perselisihan hubungan industrial diselesaikan dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. XYZ Finance senantiasa memperhatikan pengaduan atau keluhan karyawan yang berkaitan dengan hubungan kerja, praktik kepegawaian dan pelanggaran hak asasi manusia.
- 14.. Melalui penerapan dan penghayatan budaya kerja inilah diharapkan para karyawan dapat menjadi pribadi yang beretika, memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya, memiliki kemauan dan semangat bekerja yang tinggi, dan mengutamakan kerjasama sehingga berhasil mencapai tujuan XYZ Finance.
15. Terkait dengan budaya kerja yang sehat, XYZ Finance dapat menerapkan kebijakan antikorupsi yang berlaku di XYZ Finance merupakan bentuk peningkatan kualitas implementasi GCG di Perusahaan. Seluruh jajaran Perusahaan; baik Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan XYZ Finance, senantiasa menjunjung tinggi persaingan usaha yang adil, nilai sportivitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG.
16. Proses kredit dan penjelasan perjanjian kredit yang jelas serta tidak terjadi tindakan kecurangan pada saat awal kredit, baik dari sisi akurasi data dan keaslian dokumen yang dilampirkan oleh konsumen dan harus diverifikasi ulang. Pendaftaran akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia

dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dari sisi dokumen kredit tidak ada yang bermasalah dan sah didepan hukum.

17. Langkah pemasaran atas produk pembiayaan XYZFinance yang terutama adalah pemasaran melalui referensi dealer. Langkah ini memberikan kontribusi paling besar dari seluruh fasilitas pembiayaan yang dibukukan XYZFinance . Maka XYZfinance berupaya untuk terus menjalin hubungan yang baik dan erat dengan dealer melalui berbagai macam program insentif yang diberikan kepada dealer.
18. XYZ Finance dapat melakukan melakukan program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility atau CSR) yang terkait dengan bidang lingkungan, praktik ketenagakerjaan dan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab kepada konsumen dan pelanggan. Khusus bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan, kegiatan Perusahaan meliputi program-program di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan dan donasi umum.
19. Indisipliner dan ketidakakuratan dalam pembuatan laporan harus dilakukan tindakan perbaikan oleh masing-masing pimpinan dengan melakukan sosialisasi ulang terhadap semua karyawan dan menegaskan kembali akan sanksi yang akan diberikan jika masih terjadi kesalahan di kemudian harinya.

**Tabel 5.1 :Implikasi Penelitian**

<b>Implikasi</b>	<b>Aspek</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Hasil</b>
1.Sosialisasi Nilai	- Transparansi	- Kejelasan Tujuan	- Kinerja Perusahaan
2.Team Work	- Akuntabilitas	- Harmonisasi	- Efektivitas Kinerja
3.Proses Kredit	- Responsibiliti	- Mitigasi Resiko	- Kualitas Piutang
4.Pengendalian Operasional	- Akuntabilitas	- Reduce Cost	- Profit Optimal
5.Komunikasi Intensif	- Transparansi	- Motivasi Kerja	- Produktivitas SDM
6.Mengenal Konsumen	- Responsibiliti	- Mitigasi Resiko	- Kontinuitas
7.Integrasi System	- Fairness	- Keunggulan	- Nilai Perusahaan
8.Penyediaan Informasi	- Transparansi	- Update Nilai	- Keunggulan Team
9.Kemudahan Transaksi	- Independensi	- Kompetitiveness	- Efektivitas Kinerja
10.Pengembangan Potensi	- Fairness	- Motivasi Kerja	- Produktivitas SDM
11.Ketepatan Rekrutmen	- Responsibiliti	- Mitigasi Resiko	- Efektivitas Kinerja
12.Performance Indikator	- Fairness	- Evaluasi SDM	- Efektivitas Kinerja
13.Hubungan Industrial	- Responsibiliti	- Reduce Cost	- Nilai Perusahaan
14.Perilaku Organisasi	- Akuntabilitas	- Harmonisasi	- Daya Saing
15.Budaya Kerja	- Akuntabilitas	- Keunggulan	- Optimalisasi Team
16.Kepatuhan Hukum	- Responsibiliti	- Reduce Cost	- Nilai Perusahaan
17.Mitra Kerja	- Fairness	- Networking	- Kinerja Perusahaan
18.Tanggungjawab Sosial	- Independensi	- Harmonisasi	- Nilai Perusahaan
19.Kontiniu Improvment	- Akuntabilitas	- Keunggulan	- Kontinuitas

**Sumber : Hasil Penelitian 2017**

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Walaupun telah dilakukan dengan baik penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang tidak bisa dihindari. Yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Berbagai faktor atau variabel yang mempengaruhi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pelaksanaannya disebuah organisasi atau perusahaan, peneliti hanya melihat langsung bagaimana prinsip-prinsip *good corporate governance* berjalan dan bagaimana kondisinya dijalankan serta tanggapan para pemangku kepentingan yang ada dalam organisasi

atau perusahaan tersebut dan tidak mengaitkan hubungan atau pengaruh dari variabel-variabel lain.

2. Peneliti juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan konfirmasi data dan wawancara serta fenomena-fenomena yang ditemukan. Peneliti hanya melihat dari sebahagian kecil dari ruang lingkung yang luas serta responden yang terbatas yang belum dapat menggambarkan kondisi real dan actual prinsip-prinsip *good corporate governance* dilakukan, penulis tidak melibatkan jajaran Direksi, Komisaris dan Pemegang saham, mitra kerja dalam pengisian kuesioner dan wawancara GCG tersebut.
3. Peneliti juga tidak melakukan pembahasan pada unit usaha syariah yang ada serta bagaimana GCG pada unit usaha syariah tersebut berjalan. Peneliti hanya memfokuskan pada unit usaha reguler/konvensional dan hanya khusus di cabang-cabang di wilayah Sumut serta responden yang dijadikan narasumber langsung ditentukan dengan jabatan tertentu serta begitu juga dengan narasumber pada saat wawancara, peneliti hanya mengambil narasumber pada kantor wilayah Sumut dan tidak melibatkan pimpinan masing-masing cabang-cabang.

## 5.4 Saran

### 5.4.1 Saran Untuk Penelitian Kuantitatif

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan penentuan metode yang tepat, maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal untuk penelitian selanjutnya, terutama dalam menetapkan metode yang digunakan nantinya dapat dipergunakan kerangka pikir atau model penelitian dengan mempergunakan variabel lain yang

berhubungan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dalam hal ini peneliti menyarankan agar mempergunakan variabel evaluasi kinerja dengan metode evaluasi 360 derajat, dan dapat juga dipergunakan variabel motivasi kerja karyawan, kompetensi karyawan, tim kerja serta kepemimpinan dalam melihat bagaimana prinsip-prinsip *good corporate governance* dilaksanakan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk memperoleh hasil yang akurat, maka pada penelitian selanjutnya dapat juga ditambahkan dengan perluasan populasi dan pengambilan sampel dari karyawan PT. XYZ Finance mulai dari Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan pimpinan-pimpinan tinggi yang ada di kantor pusat maupun di kantor wilayah serta masing-masing kantor-kantor yang ada di PT. XYZ Finance sebagai akurasi hasil yang lebih tepat dan menggambarkan perusahaan secara keseluruhan.

#### **5.4.2 Saran Untuk Penelitian Kualitatif**

Pada penelitian kualitatif penulis menyarankan agar menambah jumlah informan yang dilakukan wawancara di tingkat nasional/kantor pusat serta informan-informan dari pihak konsumen yang mempergunakan jasa pembiayaan dari PT. XYZ Finance serta dapat juga dilibatkan pihak otoritas dalam hal ini adalah pihak dari otoritas jasa keuangan baik ditingkat pusat dan perwakilan di masing-masing daerah terhadap kinerja serta pelaksanaan prinsi-prinsip tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik sesuai dengan POJK No.29/POJK/5/2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Covey Stephen R, 1998. *The Seven Habits Of Highly Effective People*, alih bahasa oleh Budijanto, proofreader Lyndon Saputra. Bina rupa aksara. Jakarta.
- Hamdani, 2016. *Good Corporate Governance (Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Idrus Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Penerbit Erlangga.
- Kertonegoro Sentanoe. 1997. *Perilaku di Tempat Kerja*, YTKI. Jakarta.
- Kasmir, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, Cetakan XIV.
- Lilin Budiati, 2012, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Moh.Wahyudin Zarkasyi, 2008. *Good Corporate Governance*, Alfabeta : Bandung
- Muh. Arief Effendi, 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Nasution Bismar, 2013. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung : BooksTerrace & Library.
- Purwaningsih Endang, 2010. *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia),Cetakan I
- Saul, M. Katz, 1990. *Model Pembangunan Lembaga: Suatu Pandangan dari Segi Sistem*, dalam Joseph W. Eaton ed 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional, Dari Konsep ke Aplikasi*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sudjana, 2000, *Metode Statistik*, Transito: Bandung.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Metode Reseach)*, Cetakan ke-7. Bandung : Alfabeta.
- Sutedi Adrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta : Raih Asa Sukses, Cetakan I. Bandung : Alfabeta.

- Surya Indra, Yustiavandana, 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Suhady Dkk, 2004. *Fokus Dan Solusi Menuju Terwujudnya Good Governance*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Citra Utama
- Usmara, 2002. *Paradigma baru Manajemen Sumber daya Manusia*, Amara Books. Yogyakarta.

### Sumber Jurnal :

- Amin Mo'taz Al-Sa'eed, 2013. "Compliance With The Principles Of Orporate Governance : Different Perspectives From Jordan", Accounting and Management Information Systems Vol. 12, No. 4, pp. 553–577, 2013
- Darmawati, Khomsyiah dan Rika Gelar R, 2005. "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan", Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Yogyakarta, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Vol 8, No.1 Januari 2005.
- Dwi Hastuti Theresia, 2005. "Hubungan antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta)", Kumpulan Materi Simposium Nasional Akuntansi VIII, Hal. 238-247.
- En Bai, C. Qiao Liu, Joe Lu, Frank M. Song, and Junxi Zhang, 2004. "Corporate governance and market valuation in China", Journal of Comparative Economics 32 (2004) 599-616.
- Kusumastuti, Sari. Supatmi, dan Perdana Sastra, 2005. "Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance. Jurnal Akuntansi dan Keuangan", Vol 9. No.2 Nopember.2007. hal 88-98.
- Khan Humera, 2011. "A Literature Review of Corporate Governance", International Conference on E-business, Management and Economics IPEDR Vol.25 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore.
- Nicholas dan Boycko, Maxim dan Shlefer, Andrei dan Vishny, Robert W, 1996. "A Theory of Privatization. Journal of Finance Economics Elsevier. Vol. 35 (2). Barclay dan Holderness. 1990. Social Responsiveness, Corporate Structure, and Economic Performance", Academy of Management Review, Vol.7, No.2, 235-241, 1990.

- Nur Sayidah, 2007. "*Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik (studi kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003, 2004, 2005)*", Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 11, No. 1, hal 1-19.
- Purwantini V. Titi, 2008. "*Pengaruh Mekanisme good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan*", (Studi pada Perusahaan - Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
- Ramadhaningsih, Amalian dan I Made, Karya Utama, 2013. "*Pengaruh Indikator Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility*", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.3 (2013) : 65-82.
- Rebekka Dosma Sinaga, 2013. "*Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*", Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm 2.
- Thomas S, Kaihatu, 2006. "*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*", Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 8 No. 1 Ed Maret.
- Sami H. Justin Wang, and Haiyan Zhou, 2011. "*Corporate governance and operating performance of Chinese listed firms*", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 20, hal 106 –114.
- Solomon Igbanibo Dumini, Iwedi Marshal, 2015. "*The Intermediation Functions of Finance Companies and Economic Growth: Issues, Theory and Empirical Evidence from Nigeria*", Journal of Finance and Accounting, 2015, Vol. 3, No. 3, 47-56.
- Shafi Mohamad, 2014. "*The Importance of Effective Corporate Governance*", Article in SSRN Electronic Journal · September 2004.
- Supatmi, 2007, "*Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan*", Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 14, 2007, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Todorovic Igor, 2013. "*Impact Of Corporate Governance On Performance Of Companies*", Montenegrin Journal Of Economics Vol. 9, No. 2- Special Issue (May, 2013), 47-53.
- Veronica N.P. Silvia, Yanivi S Bachtiar, 2004. "*Good Corporate Governance*", Information Asymmetry and Earnings Management. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar Bali, 2-3 Desember.

Wardani Ratna, 2006. "*Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)*", Simposium Nasional Akuntansi XI, Padang, 23-26 Agustus.

Xiao Wen, Sarbah Alfred, 2015. "*Good Corporate Governance Structures: A Must for Family Businesses*", *Journal of Business and Management*, 3, 40-57. <http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2015.31005>.

#### Sumber Tesis :

Daswandi. 2006. "*Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasional, Kompetensi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Individual Karyawan Staf PT.Semen Padang*", Thesis Pasca Sarjana Magister Manajemen Unand. (Tidak dipublikasikan)

Kaban Antonius, 2004. "*Kompetensi Aparatur BPN Kota Pekanbaru Dalam Pelayanan Hak Atas Tanah*", Skripsi, Universitas Riau. Pekanbaru (Tidak dipublikasikan).

-----, 2010. "*Hubungan Persepsi Atas Kompensasi Sikap Proaktif Dengan Motivasi Kerja Karyawan Pt. Xyz Finance, Tbk Cabang Padang*", Tesis, Universitas Andalas, Padang (Tidak dipublikasikan).

Saraswati Rara, 2012. "*Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Corporate Social Responsibility Dan Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei*", Universitas Diponegoro.

Wijaya Fenny. 2007, "*Evaluasi Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt. Astra International Tbk*", Thesis, Binus University, Jakarta

#### Sumber Internet :

Klapper, Leora and I. Love, 2002. "*Corporate Governance, Inverstor Protection and Performance in Emerging Markets*", World Bank Working Paper, <http://www.ssrn.com>

Perdana Wahyu Sentosa, 2016, "*OJK dan Stabilisasi Sistem Keuangan Nasional*", <http://www.imq21.com/news/read/44067/20111031/112218/OJK-dan-Stabilisasi-Sistem-Kuangan-Nasional.html>, diunduh pada 27 Februari 2016.